



Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan

Aslinda ^{1*}, Afrizal ², Eki Darmawan ³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Jalan Raya Dompok Telpon : (0771) 4500089; Fax : (0771) 4500091

Korespondensi penulis: aslindalinda021@gmail.com*

Abstract. *Bintan Regency is a Regency with the largest decrease in the open unemployment rate for the 2022-2023 period in the Riau Islands. This study aims to determine the strategy of the Bintan Regency Regional Government in reducing unemployment in Bintan Regency. The research method used is qualitative descriptive research with interview and documentation data collection techniques. The results of this study indicate that the Bintan Regency Manpower Office has mostly implemented its strategy well from the organizational strategy already having good strategies and policies. The program strategy has a positive impact on the workforce in improving skills and prioritizing the placement of local workers. The resource support strategy is adequate both in terms of human resources, finance, technology and infrastructure. Institutional strategy, responsible for performance targets and exercising its authority in reducing unemployment.*

Keywords: *Strategy, Local Government, Unemployment*

Abstrak. Kabupaten Bintan adalah Kabupaten dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka periode 2022-2023 terbesar di Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sebagian besar sudah menjalankan strateginya dengan baik dari strategi organisasi sudah mempunyai strategi dan kebijakan yang baik. Strategi program memberikan dampak positif bagi tenaga kerja dalam meningkatkan keterampilan serta mengutamakan penempatan tenaga kerja lokal. Strategi pendukung sumber daya sudah memadai baik dari sumber daya manusia, keuangan, teknologi dan sarana prasarana. Strategi kelembagaan, bertanggung jawab pada target kinerja dan menjalankan kewenangannya dalam penurunan angka pengangguran.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Pengangguran

1. LATAR BELAKANG

Pengangguran adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi erat berhubungan dengan masalah pengangguran. Jika ekonomi berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja secara langsung. Namun, jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan ada lebih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran di Indonesia semakin meningkat (Dewi, 2020).

Meningkatnya jumlah pengangguran juga berdampak pada masalah sosial lainnya, seperti peningkatan tingkat kemiskinan karena tingkat pendapatan akan turun untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, tidak memiliki pekerjaan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Krisis sosial dan ekonomi akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan. Setiap orang dapat mengalami kehilangan pekerjaan atau tidak

memiliki pekerjaan, terutama selama pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang telah memulangkan karyawannya, dan beberapa perusahaan bahkan harus berhenti beroperasi karena kekurangan pemasukan (Setyaningsih et al., 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan salah satu tujuannya yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja sebagai salah satu unsur pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan dapat meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 147,71 juta, atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32 persen. Angka ini turun sebesar 0,54 persen dibandingkan Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang. Masalah pengangguran tidak hanya ada di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah salah satunya di Kabupaten Bintan.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terjadi perkembangan peningkatan dan penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,01%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 8,86% kemudian menurun kembali menjadi sebesar 8,62% pada tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 6,91% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 5,43%. Hal ini menunjukkan tren yang positif dengan penurunan yang konsisten selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan sebesar 5,43% yang berada tidak jauh dari angka nasional sebesar 5,32% dan lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8%. Persentase tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya persentase pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik serta dampak dari perekonomian yang terus tumbuh. Hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan yang maksimal di wilayah Kabupaten Bintan.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di tingkat Kabupaten/Kota hanya ada lima Kabupaten/Kota di Kepri yang mengalami penurunan TPT. Kabupaten yang mengalami peningkatan TPT yaitu Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Penurunan tingkat pengangguran terbuka periode 2022-2023 terbesar di Kepulauan Riau terjadi di Kabupaten Bintan yaitu 1,48 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan berhasil mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan menurunnya angka pengangguran terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Karakteristik Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan industri sehingga membuat banyaknya para pencari kerja yang berasal dari Bintan maupun yang berasal dari luar Bintan yang mencari kerja di Kabupaten Bintan. Beberapa perusahaan besar di Kabupaten Bintan bergerak dalam sektor manufaktur, elektronik dan logistik. Hal ini, akan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Bintan sehingga peluang pekerjaan akan semakin besar.

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bintan, pada salah satu misinya dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026 tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatnya penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja. Kebijakan pembangunan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran dengan arah kebijakan yaitu penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar. Program pembangunan daerah Kabupaten Bintan dalam penurunan pengangguran yaitu program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program hubungan industrial.

Pentingnya strategi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan untuk mengatasi isu dan permasalahan pengangguran di Kabupaten Bintan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan.**

2. KAJIAN TEORITIS

Strategi

Strategi didefinisikan sebagai proses yang digunakan oleh para pemimpin puncak untuk membuat rencana yang berpusat pada tujuan organisasi yang akan datang, serta bagaimana mencapainya (Yatminiwati, 2019). Noviana (2022) mendefinisikan bahwa strategi adalah suatu rancangan yang berguna untuk memilih tujuan yang akan dicapai secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan baik pada individu maupun kelompok. Menurut Bungkuran et al. (2022) strategi ialah suatu cara atau metode dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan serta menanggapi secara cepat terhadap kesempatan atau kumpulan keputusan.

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom, juga dikenal sebagai "daerah," merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tahir, 2011).

Tenaga Kerja

Pembangunan tenaga kerja adalah salah satu bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tenaga kerja dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan martabat dan harkat manusia (Maharani et al., 2019). Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selain sumber alam, modal, dan teknologi, tenaga kerja adalah komponen produksi yang sangat penting. Secara umum, tenaga kerja adalah individu yang memiliki kemampuan untuk bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan mempunyai kemampuan untuk bekerja tetapi tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya dalam

jangka waktu tertentu. Persentase orang yang aktif mencari pekerjaan dari total angkatan kerja suatu negara dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran di negara tersebut (Suharnanik, 2023). Menurut Imanda et al. (2023) Pengangguran adalah kenyataan yang dialami oleh negara yang sedang berkembang dan juga di negara yang sudah maju.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan menjelaskan dan menganalisis fenomena yang dikaji yang bersumber dari data primer dan data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari informan yaitu sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Instruktur LPK Bintan Cakrawala dan HR Manager Perusahaan di Kabupaten Bintan. Kemudian data sekunder, peneliti menggunakan jurnal ilmiah, buku, Badan Pusat Statistik, publikasi pemerintah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan lisan melalui percakapan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, peraturan-peraturan, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman (1984) di buku metode penelitian karya Prof. Dr. Sugiyono meliputi reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal yang penting, selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi dan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memaparkan hasil temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten yang memiliki fokus salah satunya pada indikator ketenagakerjaan dengan upaya meningkatkan penanganan pengangguran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan tentang ketenagakerjaan dengan kebijakan penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai pangsa pasar. Penelitian ini untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang strategi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara dan data yang bersumber dari dokumen untuk memperkuat penelitian. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Jack Koteen yang memiliki 4 (empat) upaya strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

Strategi Organisasi Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan

Strategi organisasi adalah rencana atau pola yang menggabungkan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan berbagai tindakan dalam pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi organisasi menjelaskan mengenai perumusan visi misi dan tujuan organisasi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan.

Berkaitan dengan indikator ini, dalam mewujudkan visi dan misi maka dibutuhkan strategi dan kebijakan yang matang serta perencanaan yang baik agar organisasi dapat terus berkembang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bintan tahun 2021-2026 pada misi ke-3 yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan adalah meningkatkan kualitas penanganan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan sasaran meningkatnya penanganan pengangguran.

Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dengan melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas tinggi melalui penyusunan rencana tenaga kerja daerah, pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pembinaan, pemantauan lembaga pelatihan kerja dan LPTKS, pengoptimalan layanan informasi pasar kerja, pengembangan, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kebijakan yang dibuat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam bentuk beberapa program. Hal ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dengan tujuan penurunan angka pengangguran. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan rutin melakukan kerja sama dengan perusahaan yang ada di Bintan dalam menunjang program yang dibuat. Bentuk kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan dengan perusahaan dengan cara komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pencarian tenaga kerja seperti informasi lowongan pekerjaan, informasi penempatan

tenaga kerja, pendaftaran atau pencatatan kontrak kerja, pelatihan atau kegiatan yang lainnya.

Strategi Program Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan

Strategi program adalah strategi yang berkaitan dengan kepedulian untuk program tertentu. Dampak dari strategi program yang dilaksanakan tidak hanya berfokus dan memengaruhi program yang ada, tetapi juga mempengaruhi perihal solusi dari permasalahan yang ada. Pada lembaga pemerintahan seperti Dinas Tenaga Kerja memiliki bidang yang akan mampu menyukseskan tujuan maupun sasaran yang dimiliki. Berdasarkan struktural Dinas Tenaga Kerja menjabarkan bahwa setiap bidang memiliki peran dalam menjalankan program yang sudah dibahas sesuai dengan kebutuhan di bidang tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bintan.

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja adalah program yang diberikan oleh pimpinan atau instansi kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja sesuai dengan tujuan dan harapan instansi. Pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi untuk para pencari kerja. Pelatihan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu pesawat angkat angkut sebanyak 25 orang, las 2G sebanyak 20 orang dan las 4G sebanyak 20 orang. Selanjutnya, tahun 2023 pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan sebanyak 6 pelatihan yaitu las 2G sebanyak 20 orang, *food product* sebanyak 20 orang, menjahit sebanyak 16 orang, *scaffolding* sebanyak 20 orang, las 3G FCAW sebanyak 20 orang, dan *content creator* sebanyak 25 orang. Dampak dari program pelatihan kerja akan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam bekerja. Selain itu, kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas pencari kerja sehingga mereka lebih produktif dan mampu bersaing dalam persaingan pekerjaan di masyarakat.

Program penempatan tenaga kerja adalah program yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah daerah telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan di Kabupaten Bintan tentang penempatan tenaga kerja, didalam kerja sama ini menyepakati untuk mengutamakan pekerja lokal, berbagi informasi lowongan pekerjaan, informasi penempatan dan menerima pemagangan. Adapun jumlah kartu tanda pencari kerja dan pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Bintan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kartu Tanda Pencari Kerja dan Pencari Kerja yang
ditempatkan di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1)	2.156	3.573	3.225	2.413	1.261
Pencari Kerja yang ditempatkan (Persen)	60,81	49,5	52,12	80,4	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, 2024 (telah diolah kembali).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan dalam mengurangi angka pengangguran dilihat pada pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2023 sebesar 100 persen. Ini menunjukkan tren positif dalam pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.

Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam menurunkan angka pengangguran juga melalui pelaksanaan *job fair*. Dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Bintan, Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi, perguruan tinggi, dan pihak swasta secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bintan juga menciptakan lowongan-lowongan pekerjaan melalui media sosial dari Dinas Tenaga Kerja. Media sosial tersebut berguna untuk melihat lowongan-lowongan pekerjaan yang dibuka sebagai solusi untuk mengatasi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan.

Strategi dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh pencari kerja yang berinisiatif untuk mencari pekerjaan melalui berbagai sumber informasi yang tersedia. Upaya dari para pencari kerja melamar kerja dan kemudian diterima bekerja di perusahaan sebagai upaya dalam mengurangi angka pengangguran. Tentunya hal tersebut sangat membantu Disnaker Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Selanjutnya, program hubungan industrial adalah program untuk mendorong dan meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, memastikan syarat kerja yang adil, dan mencegah perselisihan hubungan industrial. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan melakukan penyelesaian hubungan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dilakukan dengan mediasi agar pekerja tidak dipecat semena-mena.

Hubungan Industrial ini melakukan pencatatan bagi seluruh pekerja yang merupakan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.” Peraturan perusahaan dibuat agar pekerja dan pemberi kerja tidak semena-mena dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi Pendukung Sumber Daya Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan

Strategi pendukung sumber daya berfokus pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Pada strategi pendukung sumber daya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan bekerja sama dengan LPK Bintan Cakrawala dalam melaksanakan program pelatihan kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan juga menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan dalam penempatan atau perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya mengurangi angka pengangguran. Adapun aspek yang dilihat dari strategi pendukung sumber daya yaitu sumber daya manusia, keuangan, teknologi dan sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal nonmaterial atau aset yang harus selalu tersedia dan dapat diakses. Sumber daya manusia berfungsi sebagai penggerak untuk melaksanakan semua program dan kegiatan suatu instansi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran dan kontribusi dalam mencapai kesuksesan organisasi. Implementasi strategi pemerintah daerah dalam penurunan angka pengangguran membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Tenaga pengajar di LPK Bintan Cakrawala merupakan tenaga kerja yang profesional yang sudah berpengalaman dan memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memberikan pelatihan yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang siap kerja dengan cara memberikan skill dan keterampilan sehingga mampu bersaing di dunia usaha maupun industri yang ada di Bintan. Kawasan Bintan difokuskan pada sektor pariwisata dan kawasan industri sehingga pelatihan ini diserap oleh industri-industri yang ada di Bintan.

Keuangan

Keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Anggaran yang memadai diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, agar program atau kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Anggaran menjadi salah satu penggerak utama untuk memastikan bahwa program atau kegiatan dapat dilaksanakan. Program pelatihan tenaga kerja sebagai program yang menggunakan dana yang paling tinggi. Tahun 2023 pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan sebanyak 6 pelatihan bersumber dari APBD.

Teknologi

Teknologi merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah, membuat, mengubah, menyimpan dan menyebarkan informasi dalam bentuk apapun seperti dalam bentuk gambar, ucapan, teks maupun yang lainnya. Salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Bintan meluncurkan inovasi aplikasi yaitu aplikasi Silancar (Sistem Layanan Pencari Kerja) yaitu sebuah sistem aplikasi yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pendataan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pencari Kerja, Pasal 5 yang berbunyi “Silancar memuat data dan informasi terdiri dari pelayanan pembuatan AK1 secara online, pendataan tenaga kerja, pendataan perusahaan, pelaporan wajib lapor lowongan pekerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pendataan serikat kerja, dan pendaftaran informasi pelatihan tenaga kerja”. Dengan adanya aplikasi Silancar, untuk masyarakat terutama mereka yang mencari pekerjaan, dapat dengan mudah menemukan informasi tentang pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Bintan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana atau disebut peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau gerak aktivitas dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja berfungsi sebagai aspek penunjang dan berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk melaksanakan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik maka akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan memungkinkan organisasi atau instansi

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sudah mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.

Strategi Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan

Strategi kelembagaan berfokus pada mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan suatu strategi. Strategi kelembagaan adalah strategi yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada organisasi. Tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sudah bertanggung jawab dengan target kinerja dan penurunan angka pengangguran.

Kewenangan adalah hak seorang pejabat atau institusi untuk menggunakan wewenang mereka menurut peraturan yang berlaku. Kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menjalankan program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dimiliki. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sudah menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dan penurunan angka pengangguran.

Pembahasan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan berkaitan dengan tujuannya dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang mengarah kepada visi misi pemerintah daerah Kabupaten Bintan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang kemudian dijabarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam rencana strategis.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam melaksanakan strateginya dengan melakukan pelatihan tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi untuk para pencari kerja, dan mengadakan bursa kerja khusus di SMK negeri maupun swasta dalam melatih anak-anak SMK membuat CV yang baik untuk masuk kerja. BKK juga memberikan tips menghadapi wawancara, memberikan informasi peluang pekerjaan, dan memberikan pelatihan attitude dalam bekerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan juga mengadakan kegiatan job fair dan memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial. Selain itu, juga melakukan penyelesaian hubungan perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dilakukan dengan mediasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan mempunyai aplikasi silancar sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan terutama bagi para pencari kerja dalam pembuatan AK1 secara online.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menjalin kerja sama dengan LPK Bintan Cakrawala dalam memberikan pelatihan tenaga kerja yang dimana dari pelatihan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja dengan cara memberikan skill dan keterampilan serta membantu mereka menjembatani ke dunia industri. LPK ini juga menyediakan program laba (ngelas bareng) bagi para alumni yang belum bekerja yang berguna untuk mengasah kemampuan dan keahlian mereka. Tenaga pengajar yang ada di LPK merupakan tenaga pengajar yang profesional dari segi pengalaman dan juga kualifikasi. Selain itu, LPK Bintan Cakrawala juga sudah terakreditasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan juga melakukan kerja sama dengan perusahaan di Kabupaten Bintan untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala sebagaimana yang disampaikan oleh HR Manager pada salah satu perusahaan di Kabupaten Bintan bahwa untuk di Kabupaten Bintan sendiri masih terbatasnya lembaga pendidikan atau pelatihan kerja, juga universitas maupun politeknik yang khusus masih kurang sehingga kemampuan skill tenaga kerja masih belum terlalu sesuai yang dibutuhkan perusahaan. Namun, sejauh ini perusahaan merasa terbantu dengan koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan yang berupa strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan sudah dijalankan dengan baik. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan strategi sudah berjalan dengan optimal yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga bisa meningkatkan keterampilan serta memberikan peluang kerja yang lebih besar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada Agustus 2023 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bintan sebesar 5,43 persen turun 1,48 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Pelaksanaan strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan sudah mencapai target kinerja dan termasuk Kabupaten yang berhasil pada penurunan angka pengangguran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dapat mempertahankan keberhasilan yang diraih dan

selalu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan bersertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan meningkatkan perekrutan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bintan. Diharapkan kedepannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dapat terus memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dari segi kegiatan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, memberikan informasi lowongan pekerjaan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dijalankan.

6. DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Bungkuran, A., Tampi, G. B., & Mambo, R. (2022). Analisis strategi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 146–152.

Dewi, R. (2020). Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Dumai. *Jom Fisip*, 7(2), 1–13.

Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

Imanda, D. D., Nurlatifah, R. P., Yuliana, N., & Marlina, L. (2023). Pengaruh pengangguran dan pembangunan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 1(2), 74–84.

Maharani, F., Pane, P. Y. A., Hrp, N. H., & Siregar, Z. (2019). Strategi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dalam mengurangi angka pengangguran melalui job fair di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal ESTUPRO*, 4(3), 102–107.

Noviana, V. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam menanggulangi pengangguran di Kabupaten Pringsewu. *Skripsi*. Universitas Lampung.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026.

Setyaningsih, H., Vestikowati, E., & Suwarlan, E. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Ciamis Tahun 2021. *Warta*

Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 357–370.

Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran*. Surabaya: UWKS Press.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yatminiwati, M. (2019). *Manajemen Strategi*. Lumajang: Widyagama Press.